



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

**SEKRETARIAT DPRD KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan Rahmatnya dan hidayahnya sehingga dapat menyusun dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebagai bentuk awal pertanggung jawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara .

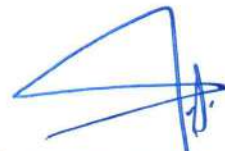
Perubahan Perjanjian Kinerja disusun dari Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) instansi pemerintah serta merupakan salah satu bagian penting dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Perubahan Perjanjian Kinerja juga merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Penyusunan dokumen penetapan kinerja merupakan dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan Perubahan Perjanjian Kinerja perjanjian kinerja ini, diharapkan para pemangku jabatan agar lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kuwajibannya. Sehingga pimpinan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, efektif dan akuntabel adalah di perlukan sikap yang sungguh-sungguh oleh seluruh penyelenggara Pemerintah terutama baik yang diberi amanah sebagai penanggung jawab dan

pelaksana kegiatan, maka seluruh pejabat struktural Sekretariat DPRD membuat dan menyatakan secara tertulis untuk merealisasikan kegiatan dengan pertanggungjawaban melalui perjanjian Kinerja kepada atasan

Demikianlah Penyusunan laporan Penetapan Kinerja ini bila mana masih terdapat kekurangan oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan dapat memberi saran dan masukan agar dalam penyusunan Penetapan Kinerja berikutnya dapat menjadi lebih baik. Serta tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, sehingga Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat di selesaikan.

Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2022
Sekretaris DPRD
Kabupaten Kutai Kartanegara



H.M. Ridha Darmawan, SP., MP

Pembina Utama Muda
NIP: 19701117 199803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Kegiatan	1
B. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja	2
C. Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara.....	3
D. Sistematika Penyusunan	4
BAB II. LANDASAN HUKUM	5
BAB III. PERJANJIAN KINERJA	7
BAB IV. PENUTUP	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perubahan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan hal tersebut, telah disusun Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah dan Peningkatan Kinerja SKPD yang merupakan salah satu kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat penting dan Strategis. Karena kegiatan ini merupakan bentuk komitmen penanggungjawab kegiatan untuk melaksanakan dengan sungguh – sungguh kegiatan yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan perwujudan dan komitmen sikap aparatur penanggung jawab dan pelaksana rencana kerja tahunan yang akan dicapai oleh instansi / unit kerja. Perjanjian Kinerja ini merupakan pernyataan atau sebuah Dalam mewujudkan suatu tujuan pelaksanaan kegiatan sebagai unsur pelayanan terhadap anggota Dewan Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara Sehubungan hal tersebut, telah disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah dan Peningkatan Kinerja SKPD yang merupakan salah satu kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja dilingkungan Pemerintah Daerah, komitmen yang menggambarkan upaya pencapaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah dalam satu tahun .

B. Tujuan Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sekarang ini dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun Kegiatan penyusunan Perjanjian Kinerja ini dimaksudkan dan bertujuan untuk :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Percepatan untuk mewujudkan manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel.
3. Mencapai tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
4. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemerintah yang amanah dengan pemberi amanah.
5. Agar mendapatkan informasi yang komprehensif tentang proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui perencanaan program yang terkoordinir dan partisipatif.
7. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.
8. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi .
9. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.

C. Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan dalam hal ini Visi merupakan suatu komitmen dan upaya merancang dan

mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Pernyataan Visi yang artikulasi yang akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat ini dan mengantisipasi perubahan dimasa yang akan datang, sehingga dapat dilaksanakan sesuai target yang sesuai dengan Misi seketariat DPRD yaitu Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat yang bertujuan dari pada Misi Sekretariat DPRD , Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan, serta Meningkatkan pelayanan publik pemerintahan daerah.

Visi tersebut mengandung makna adanya upaya yang maksimal dari seluruh aparaturnya untuk bisa lebih Profesional didalam pelaksanaan tugas pelayanan dan kelancaran sehingga mampu menjadi institusi yang Profesional dan Berkualitas.

Perumusan misi Organisasi harus memperhatikan dan menampung masukan dari pihak – pihak yang berkepentingan dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai dengan kebutuhan, tantangan dan perkembangan Organisasi.
2. Meningkatkan tata tertib administrasi kesekretariatan yang Akuntabel dan Transparan.
3. Meningkatkan Fasilitas serta ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

D. Sistematika Penyusunan

Ruang lingkup penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi.

Sistematika Perjanjian kinerja dilaksanakan secara Akuntabel dan Kinerja

Instansi pemerintah dan peningkatan Kinerja OPD Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara meliputi sebagai berikut :

I. Pendahuluan

(Latar belakang, Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja, Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Sistematika Penyusunan).

II. Landasan Hukum

III. Penetapan Kinerja

IV. Penutup

BAB II

LANDASAN HUKUM

Permasalahan yang sering timbul dalam suatu OPD adalah bagaimana melihat dan mengukur transparansi, capaian dan kinerja seluruh pegawainya, hal ini diperlukan ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap OPD serta bagaimana masyarakat dapat mengetahui capaian kinerja yang dihasilkan pemerintah tersebut. Sesuai ketentuan yang sudah berlaku sehingga Penetapan Kinerja merupakan Perjanjian jenis kegiatan dasar dalam mencapai penyusunan laporan yang akuntabel dan profesionalisme kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun yang menjadikan landasan hukum untuk Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9)
2. Undang – undang No. 23 tahun 20014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
3. Undang – undang Nomor 18 tahun 20016 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
4. Undang – undang Nomor 33 tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2006 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 9 / M.PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pendayagunaan Jangka Panjang Daerah.,dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
10. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 389 Tahun 2003 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
11. Menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 066/132/OGR tanggal 18 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyampaian Pelaporan Kinerja Tahun 2016, Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota.
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III PERJANJIAN KINERJA

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Merupakan bagian dari pada unsur pelaksana dan penggerak roda pemerintahan sehingga dengan disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang dibuat dalam rangka menggambarkan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Merupakan kegiatan yang nyata secara sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Penetapan kinerja dan perjanjian kinerja yang ditetapkan secara selektif dalam subtransi strategis pencapaian tujuan

Adapun Penetapan Kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu.

Pernyataan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan pemberi amanah atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas target kinerja ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda suatu kesanggupan untuk yang ditetapkan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dapat di sinergikan dengan program dan kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 Melalui penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 diharapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, yang dimaksud Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sekarang ini dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran tahun 2022 sekretariat DPRD diharapkan dapat dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan kewenangan yang disampaikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022

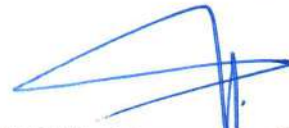
Penetapan kinerja ini merupakan implementasi peraturan perundang – undangan guna memberikan penjelasan kepada Publik bahwa segenap Aparatur telah menyatakan komitmennya untuk bekerja secara sungguh – sungguh mewujudkan tuntutan publik sehingga terwujud Profesionalisme pegawai yang mampu melaksanakan kinerja secara Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat yang bertujuan dari pada Misi Sekretariat DPRD , Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan, serta Meningkatkan pelayanan publik pemerintahan daerah.

Demikian laporan Perjanjian Kinerja ini dibuat dalam rangka Peningkatan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat kami sampaikan dengan ucapan terima kasih.

Tenggarong, 18 Oktober 2022

Sekretaris DPRD
Kabupaten Kutai Kartanegara



H.M.Ridha Darmawan.SP.MP

Pembina Utama Muda

Nip.19701117 199803 1 008

Perubahan Perjanjian kinerja
Sekretariat DPRD
Kabupaten kutai kartanegara
Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H.M. RIDHA DARMAWAN.SP.MP

Jabatan : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH.M.Si

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Melaksanakan Infut Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP tepat waktu;
5. Mewujudkan tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN

6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Melaksanakan perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi berdasarkan fungsi Perangkat Daerah;
8. Melaksanakan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Monitoring (Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 28 Oktober 2022

Pihak Kedua,

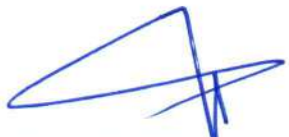
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DPRD



H.M. RIDHA DARMAWAN, SP.MP

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19711117 199803 1 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Predikat Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai	80
		Temuan Administrasi BPK / Inspektorat yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	3
		Jumlah Aset Kendaraan roda empat yang Ditertibkan	Jumlah	44
		Persentase Identifikasi Inventarisasi aset Dalam Penelusuran	Persen	100
		Pengamanan Bidang Tanah	Sertifikat	1
		Persentase ketepatan Infut Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP (Maksimal 7 hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah Kesepakatan RPJMD Tahun 2022)	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2021	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2021	Persen	100
		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Audit Layanan Sekretariat DPRD	Sertifikat	1
3	Meningkatnya Ketersediaan rumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Persentase ketersediaan rumusan alternatif kebijakan yang strategis dan insidental dalam bentuk dokumen telaahan staf	Persen	100

KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
			(APBN / APBD)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 95.312.775.927	APBD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp. 51.718.044.622	APBD
		Rp 147.030.820.549	

Kutai Kartanegara, 28 Oktober 2022

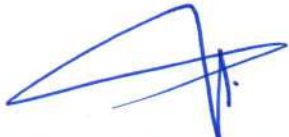
Pihak Kedua,

BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH M.Si

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DPRD


H.M. RIDHA DARMAWAN SP.MP

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19711117 199803 1 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AW.AGUS DHARMAWAN.,SE.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.M.RIDHA DARMAWAN.,SP.,MP**

Jabatan : **SEKRETARIS DEWAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Jabatan;
7. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
8. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;

9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

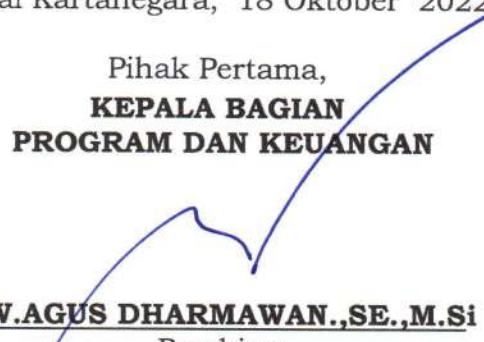
Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DEWAN



H.M.RIDHA DARMAWAN.,SP.,MP
Pembina Utama Muda
NIP.19701117 199803 1 008

Pihak Pertama,
**KEPALA BAGIAN
PROGRAM DAN KEUANGAN**



AW.AGUS DHARMAWAN.,SE.,M.Si
Pembina
NIP.19720828 200112 1 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	dokumen	12
2	Tersedianya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Jumlah laporan	Laporan	5
3	Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
4	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan	2
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Pengelolaan Aset	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100

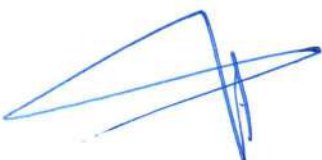
Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Potensi Menimbulkan Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

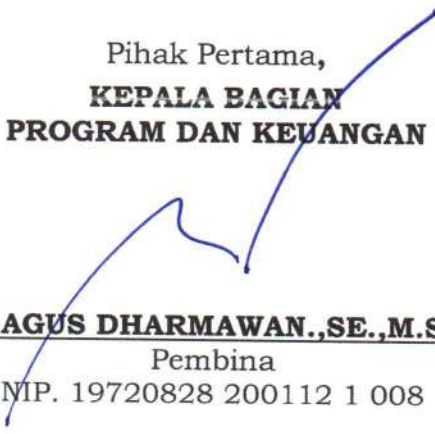
NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.197.156.700,-	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 19.041.829.958,-	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 549.322.000,-	APBD
4	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp. 36.201.341.844,-	APBD
5	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp. 2.433.480.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 60.423.130.502,-	

Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DEWAN


H.M. RIDHA DARMAWAN., SP., MP
Pembina Utama Muda
NIP.19701117 199803 1 008

Pihak Pertama,
**KEPALA BAGIAN
PROGRAM DAN KEUANGAN**


AW. AGUS DHARMAWAN., SE., M. Si
Pembina
NIP. 19720828 200112 1 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FARUQ RAHMAN.,S.Sos**

Jabatan : **PERENCANA AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR
PERENCANAAN & PENGANGGARAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AWANG AGUS DHARMAWAN.,SE.,MP**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PROGRAM & KEUANGAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan .
2. Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek.
3. Menyusun perencanaan program dan kegiatan
4. Menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan
5. Mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator :

6. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
7. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

8. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
9. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
10. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
11. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
12. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN
KEUANGAN**

**PERENCANA AHLI MUDA SELAKU SUB
KOORDINATOR PERENCANAAN &
PENGANGGARAN**

AWANG AGUS DHARMAWAN.,SE.,M.S.i

Pembina

NIP. 19720828 200112 1 008

FARUQ RAHMAN.,S.Sos

Penata

NIP.19850126 200604 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersediannya Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	12
2	Terlaksanannya Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan	Layanan	5

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR PERENCANAAN & PENGANGGARAN

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	2
2	Tersediannya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	2
3	Tersediannya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
4	Tersediannya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	2
5	Tersediannya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
6	Tersediannya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil	Jumlah laporan	Laporan	2

	koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD			
7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	2
8	Tersediannya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Stel	Stel	520
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 395.930.000,-	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 427.789.000,-	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 180.212.200,-	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 336.837.000,-	APBD

5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 244.079.500,-	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Rp. 317.472.000,-	APBD
7	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Rp. 294.837.000,-	APBD
8	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp. 590.450.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 2.787.606.700,-	

Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

AWANG AGUS DHARMAWAN.,SE.,M.Si

Pembina

NIP.19720828 200112 1 008

Pihak Pertama,

PERENCANA AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR PERENCANAAN & PENGANGGARAN



FARUQ RAHMAN.,S.Sos

Penata

NIP.19850126 200604 1 005



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. FITRIANI.,SE**

Jabatan : **ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR
AKUNTANSI & PELAPORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AWANG AGUS DHARMAWAN.,SE.,MP**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PROGRAM & KEUANGAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi;
2. Menyusun konsep laporan hasil analisis;
3. Menganalisis data penerapan sistem penganggaran;
4. Menganalisis dan mengharmonisasikan usulan kebijakan/peraturan penganggaran;
5. Menganalisis dampak anggaran/fiscal atas usulan kebijakan/peraturan;
6. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan implementasi kebijakan/peraturan penganggaran;
7. Mengkaji peraturan yang mengalami kendala dan/atau permasalahan pada tataran implementasi
8. Menganalisis kebutuhan bimbingan teknis penganggaran;
9. Menyiapkan bahan bimbingan teknis penganggaran, dan
10. Melaksanakan bimbingan teknis penganggaran.

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator:

11. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan

dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;

12. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
13. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
14. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
15. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
16. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
17. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN
KEUANGAN**

AWANG AGUS DHARMAWAN.,SE.,M.S.i

Pembina

NIP. 19720828 200112 1 008

Pihak Pertama,

**ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORDINATOR AKUNTANSI &
PELAPORAN**

Hj. FITRIANI.,SE

Penata Tingkat I

NIP.19691124 199203 2 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Keuangan Peangkat Daerah yang Akuntabel	Jumlah Laporan	Laporan	6
2	Tersediannya Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	1

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR AKUNTANSI & PELAPORAN

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	1
2	Tersediannya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Kali	Kali	2
3	Tersediannya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	18
4	Terlaksanannya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	1
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip	Persen	100

		Perangkat Daerah		
	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 121.281.000,-	APBD
2	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp. 124.746.000,-	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 858.628.000,-	APBD
4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 726.322.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.1.653.977.000,-	

Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

AWANG AGUS DHARMAWAN.,SE.,MP

Pembina

NIP. 19720828 200112 1 008

Pihak Pertama,

**ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORDINATOR AKUNTANSI &
PELAPORAN**

Hj. FITRIANI.,SE

Penata Tingkat I

NIP.19691124 199203 2 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD DALEQ.,SE**

Jabatan : **ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR VERIFIKASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AWANG AGUS DHARMAWAN.,SE.,MP**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PROGRAM & KEUANGAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menganalisis perhitungan dan realisasi APBD;
2. Menganalisis hasil rancangan arsitektur dan informasi kinerja penganggaran per Bagian Anggaran;
3. Menelaah rencana kerja dan anggaran;
4. Menganalisis data lapangan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi;
5. Menguji validasi data realisasi dan perkiraan realisasi PNB (Outlook);
6. Menganalisis terhadap hasil validasi data terkait pelaksanaan pengelolaan PNB;

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator:

7. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;

8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
9. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
10. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
11. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
12. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
13. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
14. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN
KEUANGAN**

**ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORDINATOR VERIFIKASI**

AWANG AGUS DHARMAWAN.,SE.,M.S.i

Pembina

NIP. 19720828 200112 1 008

MUHAMMAD DALEQ.,SE

Pembina Muda Tingkat I

NIP.19730820 200112 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersediannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Jumlah Laporan	Laporan	6
2	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Persentase	Persen	100%

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR VERIFIKASI

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang	Orang/Bulan	2136
2	Tersediannya Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan	Laporan	2
3	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan	Bulan	12
4	Terselenggaranya Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Orang	Orang	540
5	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang	Orang	120
6	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Orang	Orang	7
7	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1

	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 17.496.890.058,-	APBD
2	Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 132.682.900,-	APBD
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 307.602.000,-	APBD
4	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp. 35.273.391.844,-	APBD
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp. 337.500.000,-	APBD

5	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Rp. 2.055.300.000,-	APBD
6	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp. 378.180.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.55.981.546.802,-	

Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR VERIFIKASI

AWANG AGUS DHARMAWAN.,SE.,M.Si

Pembina

NIP.19720828 200112 1 008

MUHAMMAD DALEQ.,SE

Pembina Muda Tingkat I

NIP.19730820 200112 1 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURHAYATI TOURISTIANY.,S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.M.RIDHA DARMAWAN.,SP.,MP**

Jabatan : **SEKRETARIS DEWAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Jabatan;
7. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
8. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;

9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

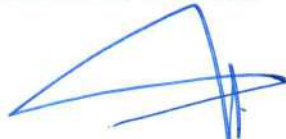
1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DEWAN



H.M.RIDHA DARMAWAN, SP.,MP

Pembina Utama Muda
NIP.19701117 199803 1 008

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN
PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**



NURHAYATI TOURISTIANY, S.Sos

Penata
NIP.19731108 200312 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya layanan Administrasi DPRD	Jumlah layanan	layanan	3
2	Tersedianya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang dibuat	Jumlah Peraturan Daerah	PERDA	16
3	Terlaksananya Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Persentase	Persen	100
4	Terlaksananya Prosentase Fasilitas Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Persentase	Persen	100
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Pengelolaan Aset	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	RP. 9.127.281.944,-	APBD
2	Peningkatan Kapasitas DPRD	RP. 9.452.344.000	APBD
3	Fasilitasi Tugas DPRD	RP. 20.620.968.383,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		RP.39.200.594.327,-	

Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DEWAN

H.M.RIDHA DARMAWAN,SP.,MP

Pembina Utama Muda
NIP.19701117 199803 1 008

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN
PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

NURHAYATI TOURISTIANY.,S.Sos

Penata
NIP. 19731108 200312 2 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LITA ROSARIA FEBRYANTI.,S.Pi.,MM**

Jabatan : **PRANATA HUMAS AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR HUMAS, PROTOKOL DAN PUBLIKASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NURHAYATI TOURISTIANY.,S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG UNDANGAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun Rencana kerja Pengembangan Pelayanan informasi dan kehumasan;
2. Mengikuti rapat pimpinan yang berkaitan dengan pelayanan informasi dan kehumasan;
3. Mengevaluasi program pelayanan informasi dan kehumasan;
4. Membuat laporan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, yang bersifat program;
5. Membuat laporan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, yang bersifat rutin;
6. Membuat laporan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, yang bersifat berkala;
7. Mengevaluasi model layanan informasi dan kehumasan;
8. Mengolah isu hubungan internal;
9. Menyelenggarakan kegiatan pertemuan dengan kalangan media atau pres sebagai peserta;

10. Mengikuti seminar, lokakarya, pertemuan yang terkait dengan layanan informasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) atau pertemuan sejenis, sebagai moderator;
11. Melaksanakan kegiatan kunjungan jurnalis sebagai peserta;
12. Melaksanakan tugas sebagai pemandu acara (master of ceremony)
13. Melakukan wawancara dalam kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan;
14. Mengikuti kunjungan kerja atau acara seremonial pimpinan;

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator:

15. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
16. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
17. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
18. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
19. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
20. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
21. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
22. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
23. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Oktober 2022
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

**KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
DAN PERUNDANG UNDANGAN**

NURHAYATI TOURISTIANY.,S.Sos

Pembina

NIP. 19731108 200312 2 001

**PRANATA HUMAS AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORDINATOR HUMAS,
PROTOKOL DAN PUBLIKASI**

LITA ROSARIA FEBRYANTI.,S.Pi.,MM

Pembina

NIP. 19780203 200112 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Persentase	Persen	100%

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR HUMAS, PROTOKOL DAN PUBLIKASI

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Peserta	Orang	45
2	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Media	Media	15
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100

	jabatan			
	Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang	Output Tanpa Potensi	Capaian Output Kegiatan	Persen 100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pendalaman Tugas DPRD	Rp 3.175.000.000,-	APBD
2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rp. 5.401.120.000,-	APBD
3	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Rp 6.015.888.383,-	APBD
4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rp. 700.000.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.15.292.001.383,-	APBD

Kutai Kartanegara, 28 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
DAN PERUNDANG UNDANGAN**

**PRANATA HUMAS AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORDINATOR HUMAS,
PROTOKOL DAN PUBLIKASI**

NURHAYATI TOURISTIANY.,S.Sos

LITA ROSARIA FEBRYANTI.,S.PI.,MM

Pembina

Pembina

NIP. 19731108 200312 2 001

NIP. 19771024 200701 1 011



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. EVVA HANDAYANIE.,SH**
Jabatan : **PERISALAH LEGISLATIF AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR PERSIDANGAN DAN RISALAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NURHAYATI TOURISTIANY.,S.Sos**
Jabatan : **KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG UNDANGAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Merencanakan pembuatan validasi risalah;
2. Memeriksa kelengkapan validasi risalah rapat;
3. Menelaah dan menyerahkan risalah rapat yang sudah divalidasi kepada pengguna/penyelenggara rapat untuk mendapat pengesahan;
4. Menyusun buku himpunan risalah rapat.

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator:

5. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Persentase	Persen	100%
2	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Persentase	Persen	100%
TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR PERSIDANGAN DAN RISALAH				
NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
2	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi	Koordinasi	96
3	Tersedianya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Rapat	Rapat	14
4	Tersedianya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat	Rapat	349
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100

	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
	Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang Output Tanpa Potensi	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp. 176.224.000,-	APBD
2	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp.14.263.563.000,-	APBD
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Rp. 341.524.000,-	APBD
4	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp. 3.930.060.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.18.711.371.000,-	

Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN
PERUNDANG UNDANGAN**



NURHAYATI TOURISTIANY.,S.Sos

Pembina

NIP. 19731108 200312 2 001

**PERISALAH LEGISLATIF AHLI MUDA
SELAKU SUB KOORDINATOR
PERSIDANGAN DAN RISALAH**



Hj. EVVA HANDAYANIE.,SH

Penata Tingkat I

NIP. 19761022 201001 2 002

6. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
7. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
9. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
10. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
11. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
12. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
13. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
DAN PERUNDANG UNDANGAN**



NURHAYATI TOURISTIANY.,S.Sos

Pembina

NIP. 19731108 200312 2 001

**PERISALAH LEGISLATIF AHLI MUDA
SELAKU SUB KOORDINATOR
PERSIDANGAN DAN RISALAH**



Hj. EVVA HANDAYANIE.,SH

Penata Tingkat I

NIP. 19761022 201001 2 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ATILLA MAISYARAH.,S.Sos**

Jabatan : **ANALISIS PRODUK HUKUM**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama ; **NURHAYATI TOURISTIANY.,S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG
UNDANGAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Melaksanakan Kajian Perundang-undangan;
2. Membuat konsep bahan Penyusunan Naskah Akademik;
3. Menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
4. Merancang bahan pembahasan Peraturan Daerah;
5. Membuat konsep bahan penyiapan draf peraturan daerah inisiatif;

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator:

6. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
7. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

8. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
9. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
10. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
11. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
12. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 28 Oktober 2022

Pihak Kedua,

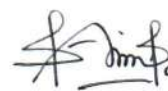
**KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN
PERUNDANG UNDANGAN**

NURHAYATI TOURISTIANY.,S.Sos
Pembina

NIP. 19731108 200312 2 001

Pihak Pertama,

ANALISIS PRODUK HUKUM



ATILLA MAISYARAH.,S.Sos
Penata Tingkat I

NIP. 19771218 200112 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah PERDA	PERDA	16
TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR KOORDINATOR KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN				
NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Rapat	Rapat	10
2	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda	Raperda	24
3	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Raperda	Raperda	24
4	Tersediannya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen	Dokumen	8
5	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pembentukan Peraturan	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31	Persen	100

		Maret 2022		
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp 746.080.477,-	APBD
2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp. 6.561.934.000,-	APBD
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Rp 602.467.467,-	APBD
4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Rp. 1.216.800.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 8.127.281.944,-	

Kutai Kartanegara, 28 Oktober 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN
PERUNDANG UNDANGAN**

NURHAYATI TOURISTIANY.,S.Sos

Pembina

NIP. 19731108 200312 2 001

Pihak Pertama,

ANALISIS PRODUK HUKUM



ATILLA MAISYARAH.,S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19771218 200112 2 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H.DEDY MULYADI,SE.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN UMUM**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.M.RIDHA DARMAWAN.,SP.,MP**

Jabatan : **SEKRETARIS DEWAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Jabatan;
7. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
8. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 28 Oktober 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DEWAN



H.M.RIDHA DARMAWAN.,SP.,MP

Pembina Utama Muda
NIP.19701117 199803 1 008

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN UMUM



H.DEDY MULYADI.,SE.,M.Si

Penata
NIP19800509 200112 1 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	Dokumen	4
2	Terlaksananya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan	Layanan	6
3	Tersedianya Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Unit	Unit	1,389
4	Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan	Bulan	12
5	Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit	Unit	254
6	Terlaksananya layanan Administrasi DPRD	Jumlah layanan	Layanan	3
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Pengelolaan Aset	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100

Pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Jabatan				
Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang	Output Tanpa Potensi	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 1.698.941.500,-	APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 5.882.992.800,-	APBD
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 9.614.999.000,-	APBD
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 9.518.551.125,-	APBD
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.191.293.600,-	APBD
6	Layanan Administrasi DPRD	Rp. 6.416.347.400,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 37.323.125.425,-	

Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DEWAN



H.M. RIDHA DARMAWAN., SP., MP
Pembina Utama Muda
NIP.19701117 199803 1 008

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN UMUM



H. DEDY MULYADI., SE., M. Si
Penata
NIP.19800509 200112 1 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. NINA MARTINI.,S.Sos**

Jabatan : **KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.DEDY MULYADI.,SE.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN UMUM**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Rcnja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
6. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
7. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;

8. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

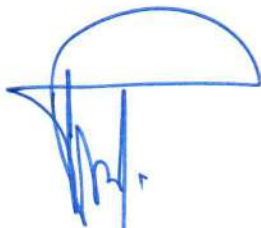
1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN UMUM



H.DEDY MULYADI.,SE.,M.Si

Pembina

NIP. 19800509 200112 1 008

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB. BAGIAN
TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN**



Hj. NINA MARTINI.,S.Sos

Penata Tingkat I

NIP.19650423 198703 2 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersediannya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	4
2	Tersediannya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan	Layanan	6
3	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Surat	Bulan	12

TUGAS SEBAGAI KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang	Orang	50
2	Terselenggaranya Bimbingan Tenis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang	Orang	20
3	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat	Laporan	218
4	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Berkas	Berkas	7

5	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat	Laporan	12
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

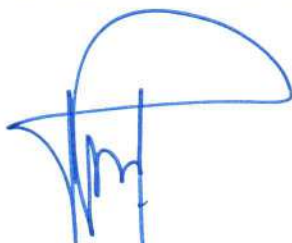
NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 925.137.000,-	APBD
2	Bimbingan Tenis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 350.000.000,-	APBD
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Rp. 500.000.000,-	APBD

	dan konsultasi SKPD		
4	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 550.000.000,-	APBD
5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 13.870.000,-	APBD
6	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Rp. 36.500.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.2.375.507.000,-	

Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN UMUM



H.DEDY MULYADI.,SE.,M.Si

Pembina

NIP. 19800509 200112 1 008

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB. BAGIAN
TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN**



Hj. NINA MARTINI.,S.Sos

Penata Tingkat I

NIP.19650423 198703 2 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. SITI MASYITAH.,S.Sos**

Jabatan : **PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR PERLENGKAPAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.DEDY MULYADI.,SE.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN UMUM**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja pada pekerjaan yang memiliki standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis, dengan output hasil pekerjaan konstruksi, layanan, atau sistem;
2. Menyusun harga perkiraan sendiri pada pekerjaan yang memiliki standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis, dengan output hasil pekerjaan konstruksi layanan, atau sistem;
3. Melakukan perumusan pemaketan dan cara pengadaan sesuai strategi pengadaan;
4. Melakukan analisis belanja untuk pelaksanaan konsolidasi pengadaan;
5. Melakukan analisis pasar untuk pelaksanaan konsolidasi pengadaan;
6. Melakukan konsolidasi pada tahap perencanaan pengadaan;
7. Melakukan konsolidasi untuk paket pengadaan barang/jasa sejenis;
8. Menyusun konsep rekomendasi atau saran untuk pembinaan atau pendampingan pengadaan barang/jasa pemerintah pada tahap perencanaan pengadaan;

9. Melaksanakan pendampingan, bimbingan teknis, atau konsultasi penggunaan sistem informasi atau aplikasi pada tahap perencanaan pengadaan;
10. Menyusun rekomendasi atau rencana tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan pada tahap perencanaan pengadaan;
11. Melakukan reviu dokumen persiapan pada tahap pekerjaan yang dilakukan dengan metode pemilihan tender, seleksi, atau penunjukan langsung;

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator:

12. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
13. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
14. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
15. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
16. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
17. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
18. Terealisasi Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
19. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
20. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

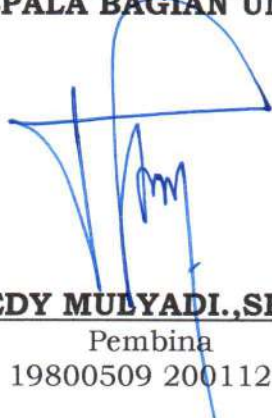
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN UMUM



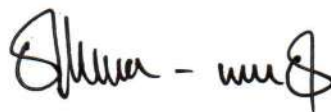
H.DEDY MULYADI.,SE.,M.Si

Pembina

NIP. 19800509 200112 1 008

Pihak Pertama,

**PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
AHLI MUDA SELAKU SUB
KOORDINATOR PERLENGKAPAN**



Hj. SITI MASYITAH.,S.Sos

Penata Tingkat I

NIP.19680427 200604 2 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Unit	4
2	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan	Layanan	3
3	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan	Layanan	6
4	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit	Unit	1389

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR PERLENGKAPAN

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian	Unit	311
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan lainnya	Jumlah Paket	Paket	1
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan	Unit	4028
4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	Porsi	9504
5	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	Lembar	3180

6	Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis Bahan Bacaan	Exsemplar	38352
7	Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan	Unit	6
8	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket	Unit	6
9	Tersedianya sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana	Unit	308
10	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana	Unit	1081
11	Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	Unit	47
12	Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	Unit	47
13	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	Unit	10
14	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana	Unit	150
15	Tersediannya Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Kebutuhan RT	Paket	4

	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

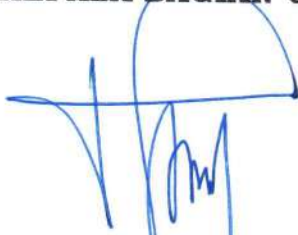
NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 423.804.500,-	APBD
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kukar	Rp. 750.000.000,-	APBD
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 965.965.800,-	APBD
4	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Rp. 1.590.203.000,-	APBD
5	Penyediaan Barang Cetak dan	Rp. 1.065.924.000,-	APBD

	Penggandaan		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 460.900.000,-	APBD
7	Pengadaan Kendaraan Dinas oprasional atau Lapangan	Rp. 1.193.360.000,-	APBD
8	Pengadaan Mebel	Rp. 150.000.000,-	APBD
9	Pengandaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Rp. 3.150.000.000,-	APBD
10	Pengandaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 5.121.639.000,-	APBD
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 411.048.000,-	APBD
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasiona atau Lapangan	Rp. 1.011.505.000,-	APBD
13	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Rp. 1.508.728.100,-	APBD
14	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Rp. 1.260.012.500,-	APBD
15	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Rp. 2.449.787.400,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.21.512.877.300,-	

Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN UMUM



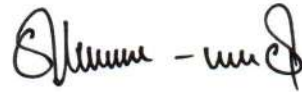
H.DEDY MULYADI.,SE.,M.Si

Pembina

NIP. 19800509 200112 1 008

Pihak Pertama,

**PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
AHLI MUDA SELAKU SUB
KOORDINATOR PERLENGKAPAN**



Hj. SITI MASYITAH.,S.Sos

Penata Tingkat I

NIP.19680427 200604 2 007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEWI SASMITA.,S.Sos.,MM**

Jabatan : **PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA
SELAKU SUB KOORDINATOR RUMAH TANGGA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.DEDY MULYADI.,SE.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN UMUM**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja pada pekerjaan yang memiliki standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis, dengan output hasil pekerjaan konstruksi, layanan, atau system;
2. Menyusun harga perkiraan sendiri pada pekerjaan yang memiliki
3. standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis, dengan output hasil pekerjaan konstruksi layanan, atau system;
4. Melakukan konsolidasi untuk paket pengadaan barang/jasa sejenis;
5. Menganalisis hasil klarifikasi usulan barang/jasa;
6. Melakukan penyusunan daftar penyediaan barang/jasa pemerintah;

7. Melakukan perumusan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dalam bentuk surat perjanjian;
8. Melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak pada pekerjaan yang memiliki standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis, dengan output hasil pekerjaan konstruksi, layanan, atau system;
9. Melakukan serah terima hasil pengadaan pada pekerjaan yang memiliki standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis, dengan output hasil pekerjaan konstruksi, layanan, atau system;
10. Mengevaluasi kinerja penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah;

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator:

11. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
12. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
13. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
14. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
15. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
16. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
17. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
18. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN UMUM



H.DEDY MULYADI.,SE.,M.Si

Pembina

NIP. 19800509 200112 1 008

**PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
AHLI MUDA SELAKU SUB
KOORDINATOR RUMAH TANGGA**



DEWI SASMITA.,S.Sos.,MM

Pembina

NIP.19730109 199503 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan	Bulan	12

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR RUMAH TANGGA

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa	Bulan	12
2	Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	Bulan	12

	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100

	fungsi jabatan			
	Terealisasi Kegiatan Menimbulkan Utang	Output Tanpa Potensi	Capaian Output Kegiatan	Persen 100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 2.999.999.600,-	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 6.504.681.525,-	
JUMLAH ANGGARAN		Rp.9.504.581.125,-	

Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN UMUM



H.DEDY MULYADI.,SE.,M.Si

Pembina

NIP. 19800509 200112 1 008

Pihak Pertama,

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
AHLI MUDA SELAKU SUB
KOORDINATOR RUMAH TANGGA



DEWI SASMITA.,S.Sos.,MM

Pembina

NIP.19730109 199503 2 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SOFIAN ASHURI.,S.Sos.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.M.RIDHA DARMAWAN.,SP.,MP**

Jabatan : **SEKRETARIS DEWAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Jabatan;
7. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
8. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;

10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

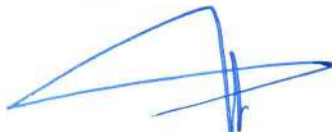
1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DEWAN



H.M.RIDHA DARMAWAN.,SP.,MP

Pembina Utama Muda

NIP.19701117 199803 1 008

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN
PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN**



SOFIAN ASHURI.,S.Sos.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.19650505 198602 1 013

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksanannya Rapat Pembahasan	Jumlah Rapat	Rapat	18
2	Terlaksanannya Pengawasan DPRD	Jumlah Kali	Kali	190
3	Terlaksanannya Persentase Kegiatan yang terlaksana	Jumlah Persentase	Persen	100
4	Terlaksanannya Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan	Jumlah Persentase	Persen	100
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Pengelolaan Aset	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

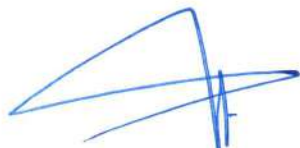
PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp.1.399.584.000.-	APBD
2	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.4.595.513.000.-	APBD
3	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp.3.690.585.500.-	APBD
4	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp. 363.700.000.-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.10.049.382.500.-	APBD

Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DEWAN



H.M.RIDHA DARMAWAN, SP.,MP

Pembina Utama Muda
NIP.19701117 199803 1 008

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN
PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN**



SOFIAN ASHURI., S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP.19650505 198602 1 013



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. AKHMAD.,SE.,MM**

Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB
KOORDINATOR KERJASAMA DAN ASPIRASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SOFIAN ASHURI.,S.Sos.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan;
2. Menyusun dan menetapkan metodologi untuk melakukan analisis kebijakan (sesuai dengan kebutuhan), yang bersifat sederhana (1-2 metode);
3. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih untuk menganalisis kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
4. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam menganalisis kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
5. Menganalisis permasalahan kebijakan;
6. Menyusun alternatif kebijakan sebagai solusi masalah kebijakan;
7. Menyusun konsep kebijakan (draft) yang bersifat beschiking (penetapan);
8. Membahas konsep kebijakan sebagai peserta/anggota;
9. Menyiapkan bahan-bahan untuk sosialisasi pelaksanaan kebijakan;
10. Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota;

11. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;
12. Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
13. Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator:

14. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
15. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
16. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
17. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
18. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
19. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
20. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
21. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
22. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

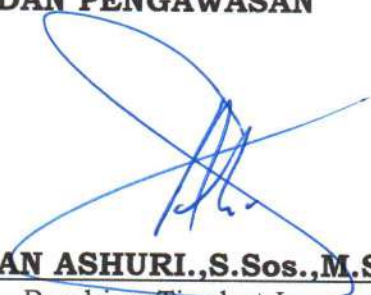
Kutai Kartanegara, 28 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

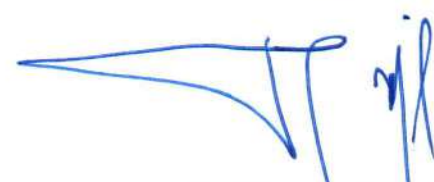
**KEPALA BAGIAN PENGANGGARAN
DAN PENGAWASAN**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORDINATOR KERJASAMA DAN
ASPIRASI**



SOFIAN ASHURI.,S.Sos.,M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19650505 198602 1 013



H. AKHMAD.,SE.,MM

Penata Tingkat I
NIP.19690101 199301 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Kegiatan	Persen	100%

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR KERJASAMA DAN ASPIRASI

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Penyusunan Pokok-Pokok Fikiran DPRD	Jumlah Dokumen	Dokumen	2
2	Pelaksanaan Reses	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	3
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100

Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
Teralisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penyusunan Pokok-Pokok Fikiran DPRD	Rp. 197.109.000,-	APBD
2	Pelaksanaan Reses	Rp. 5.054.174.500,-	APBD
3			
dst			
JUMLAH ANGGARAN		Rp.5.251.283.500,-	

Kutai Kartanegara, 28 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN PENGANGGARAN
DAN PENGAWASAN**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORDINATOR KERJASAMA DAN
ASPIRASI**

SOFIAN ASHURI.,S.Sos.,M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19650505 198602 1 013

H. AKHMAD.,SE.,MM

Penata Tingkat I
NIP.19690101 199301 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SITTI MAIMANAH.,S.Sos.,M.Si**

Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR FASILITASI PENGAWASAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SOFIAN ASHURI.,S.Sos.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun rancana kerja organisasi sebagai peserta/anggota;
2. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;
3. Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
4. Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
5. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
6. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota.

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator:

7. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;

8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
9. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
10. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
11. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
12. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
13. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
14. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
15. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 28 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN PENGANGGARAN
DAN PENGAWASAN**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORDINATOR FASILITASI
PENGAWASAN**

SOFIAN ASHURI.,S.Sos.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19650505 198602 1 013

SITTI MAIMANAH.,S.Sos.,M.Si

Penata

NIP.19851010 201001 2 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksanannya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan	Kali	190
2	Terlaksanannya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Persentase	Persen	100%

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR FASILITASI PENGAWASAN

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum	Jumlah Pengawasan	Pengawasan	36
2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan	Pengawasan	36
3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pengawasan	Pengawasan	36
4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pengawasan	Pengawasan	36
5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Pengawasan	Pengawasan	36
6	Pengawasan Tindak	Jumlah Pengawasan	Pengawasan	4

	Lanjut Hasil Pemeriksaan laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan			
7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Pengawasan	Pengawasan	4
8	Penyusunan kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
9	Pengawasan Kode Etik	Jumlah Pengawasan	Pengawasan	10
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	10440
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum	Rp. 357.500.000,-	APBD
2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rp. 357.500.000,-	APBD
3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp. 800.000.000,-	APBD
4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rp. 867.035.000,-	APBD
5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Rp. 200.000.000,-	APBD
6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Rp. 100.000.000,-	APBD
7	Pemerintahan Pengguna Anggaran	Rp. 100.000.000,-	APBD
8	Penyusunan kode Etik DPRD	Rp. 188.700.000,-	APBD
9	Pengawasan Kode Etik	Rp. 465.916.750,-	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. 3.436.651.750,-	

Kutai Kartanegara, 28 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN PENGANGGARAN
DAN PENGAWASAN**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORDINATOR FASILITASI
PENGAWASAN**

SOFIAN ASHURI.,S.Sos.,M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19650505 198602 1 013

SITTI MAIMANAH.,S.Sos.,M.Si

Penata
NIP. 19851010 201001 2 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DWI OKTIVIAWATY.,S.Sos.,M.Si**

Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB
KOORDINATOR FASILITASI PENGANGGARAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SOFIAN ASHURI.,S.Sos.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan yang bersifat sederhana (instansional);
2. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan;
3. Menyiapkan bahan-bahan untuk sosialisasi pelaksanaan kebijakan;
4. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;
5. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota;

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator:

6. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;

7. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
8. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
9. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
10. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
11. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
12. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN PENGANGGARAN
DAN PENGAWASAN**

SOFIAN ASHURI.,S.Sos.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19650505 198602 1 013

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORDINATOR FASILITASI
PENGANGGARAN**

DWI OKTIVIAWATY.,S.Sos.,M.Si

Penata Tingkat I

NIP.19721012 200112 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Rapat	Rapat	18
2	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan	Kali	190

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR FASILITASI PENGANGGARAN

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Pembahasan	Rapat	5
2	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Pembahasan	Rapat	5
3	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan	Rapat	2
4	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Pembahasan	Rapat	2
5	Terlaksananya Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Pembahasan	Rapat	2
6	Terlaksananya Pembahasan	Jumlah Pembahasan	Rapat	2

	Pertanggungjawaban APBD			
7	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Pembahasan	Rapat	2
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp. 236.497.000,-	APBD
2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp. 249.968.000,-	APBD
3	Pembahasan APBD	Rp. 446.057.045,-	APBD
4	Pembahasan APBD Perubahan	Rp. 200.000.000,-	APBD
5	Pembahasan Laporan Semester	Rp. 50.000.000,-	APBD
6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp. 113.500.000,-	APBD
7	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rp. 100.013.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.1.396.035.045,-	

Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN PENGANGGARAN
DAN PENGAWASAN**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORDINATOR FASILITASI
PENGANGGARAN**


SOFIAN ASHURI.,S.Sos.,M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19650505 198602 1 013


DWI OKTIVIAWATY.,S.Sos.,M.Si

Penata Tingkat I
NIP.19721012 200112 2 002